



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 702/VI/KI BANTEN-PS/2014

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 702/VI/KI BANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : Muara Sianturi, SE

Alamat : Jl. Garuda III Blok B No.66 Komp. Inkopol RT/003 RW/005 Kel.
Jaka Sampurna Kec. Bekasi Barat – Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang
Selatan

Alamat : Jl. Pahlawan Seribu, Cilenggang - Serpong Kota Tangerang
Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

 Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

 Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 18 Juni 2014, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 702/VI/KI BANTEN-PS/2014 pada tanggal 27 Juni 2014.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 17 Maret 2014, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Pembantu/Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan melalui surat nomor: 016/TGS/III/2014 yang diterima pada tanggal 24 Maret 2014. Adapun data yang diminta adalah sebagai berikut:

Permintaan Salinan Realisasi:

1. Alokasi dana APBD Tk I, APBD Tk II dan APBN Tahun Anggaran (TA) 2010, TA 2011, TA 2012 dan TA 2013 Meliputi:
 - Jenis Kegiatan dan alokasi Anggaran perkegiatan serta dokumen Pendukungnya
 - Jenis Anggaran maupun Bantuan yang dialokasikan terhadap kelompok Masyarakat
 - Kontrak kerja dengan pihak Ketiga serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan copy kwitansi
 - Rincian biaya perjalanan dinas serta dokumen pendukungnya
 - Rincian anggaran biaya operational kendaraan dan biaya perawatan serta copy kwitansi
 - Rincian anggaran biaya pendidikan dan latihan serta dokumen Pendukungnya.

2. Aset Daerah yang dikelola dan atau yang dialihkan kepihak Ketiga serta dokumen pendukungnya. Pendapatan Daerah atas Aset tersebut Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012 dan TA 2013 serta dokumen Pendukungnya.
3. Rincian pendapatan dana dari pelayanan masyarakat dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012 dan 2013 serta dokumen pendukungnya.
4. Rencana Alokasi Dana APBD Tk I, APBD Tk II dan APBN tahun anggaran (TA) 2014 (RAB dan dokumen pendukungnya).

[2.3] Pada tanggal 03 April 2014, Permohonan informasi ditanggapi oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika Kota Tangerang Selatan dengan Nomor Surat: 44/IV/PPID/TGS/2014, yang pada intinya meminta perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari Kerja dengan alasan informasi yang diminta belum dikuasai.

[2.4] Pada tanggal 15 April 2014, Pemohon mengajukan keberatan Kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang diterima pada tanggal 17 April 2014.

[2.5] Pada tanggal 18 Juni 2014, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Keberatan karena tidak dipenuhinya permintaan informasi

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 29 Agustus 2014, Pemohon tidak dapat hadir tanpa ada keterangan.

Surat-Surat Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

| | |
|-----------|--|
| Bukti P-1 | Kartu Tandap Penduduk atas nama Muara Sianturi, S.E |
| Bukti P-2 | Salinan Surat Permohonan Informasi Publik Nomor: 016/TGS/III/2014 Kepada PPID Pembantu/Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan yang diterima pada tanggal 24 Maret 2014. |
| Bukti P-3 | Salinan Surat Tanggapan Nomor: 44/VI/PPID/TGS/2014 dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan. |
| Bukti P-4 | Salinan Surat Nomor: 012/TGS/IV/2014 Perihal Keberatan Kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan yang diterima pada tanggal 17 April 2014. |
| Bukti P-5 | Salinan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, tertanggal 18 Juni 2014. |

[2.10] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 29 Agustus 2014, Termohon yang diwakili oleh Ir. H. Abdul Syukur dan H. Sumoharjo, A.K., M.Si berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 180/723.1/SEKRETARIAT dari pemberi kuasa Drs. H. Toto Sudarto selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menerima Surat Permohonan Informasi yang dikirimkan Pemohon dan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan, karena Termohon tidak memahami nomenklatur permohonan Pemohon.
2. Bahwa Termohon tidak menerima surat keberatan dari Pemohon.

3. Bahwa Pemohon telah salah mengirimkan Surat Keberatan yang dikirimkan kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika karena Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan bukan atasan PPID Termohon.

Surat-Surat Termohon

[2.12] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

| | |
|-----------|---|
| Bukti T-1 | Surat Kuasa Nomor : 180/723.1/SEKRETARIAT dari pemberi kuasa Drs. H. Toto Sudarto selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan Kepada Ir. H. Abdul Syukur dan H. Sumoharjo, A.K., M.Si. |
|-----------|---|

[2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya terkait dengan ketidakmengertian Pemohon terhadap permohonan informasi.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan Termohon bahwa Termohon tidak menerima Surat Keberatan dari Pemohon karena Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.5] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi karena telah salah mengirimkan Surat Keberatan.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri..”

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.7] sampai dengan paragraf [3.8] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada

pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti P-4) dan Surat Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-5).

[3.12] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [3.10] dan paragraf [3.11], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[4.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[4.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Achmad Nashrudin P selaku Ketua merangkap Anggota, Alamsyah Basri dan Toni Anwar Mahmud, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jum'at tanggal 29 Agustus 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dar Es Salam sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon dan tidak dihadiri Pemohon.



Anggota Majelis

(Alamsyah Basri)

Anggota Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

